



Penataan Kawasan Kumuh Harus Sasar Perumahan

YOGYA (KR) - Program penataan kawasan kumuh yang mulai digencarkan oleh pemerintah pusat diharapkan mulai menyasar kawasan perumahan. Hal ini lantaran permukiman padat di bantaran sungai menjadi area terbanyak yang masuk kawasan kumuh. Penataan dalam ranah perumahan itu juga dinilai bagian dari mitigasi bencana.

Menurut Ketua Pemerti Code, Totok Pratopo, sejak 2011 lalu usai banjir lahar dingin, permukiman di bantaran sungai mendapat ancaman setiap masuk musim hujan. "Ketika perumahan belum disentuh dalam upaya penataan kawasan kumuh, maka setiap tahun selalu rentan terhadap bencana,"

ungkapnya, Kamis (2/3).

Selama ini, imbuhnya, perencanaan penataan kawasan kumuh yang diusulkan kelurahan belum menempatkan perumahan sebagai objek kegiatan. Padahal, berdasarkan hasil pemetaan daerah rawan bencana di sepanjang Code, terdapat delapan kecamatan yang masuk garis merah atau kerawanan tinggi. Kawasan itu pun termasuk wilayah kumuh berdasarkan SK Walikota No 393/2011.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengusulkan agar perumahan turut menjadi sasaran penataan. Terutama dengan mempedomani konsep 'Mundur, Munggah, Madep Kali' (M3K) yang sudah digaungkan oleh

Pemda DIY. "Tapi konsep M3K itu juga masih perlu penegasan. Khususnya menyangkut mundurnya seberapa dan mungghahnya bagaimana," tandasnya.

Salah satu penataan kumuh dengan sasaran ranah perumahan, ialah dengan membangun rumah susun. Akan tetapi, jelas Totok, pemerintah di Kota Yogya mengalami kendala terkait lahan yang bisa dimanfaatkan. Namun, kendala tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai hambatan. Dirinya pun memberikan solusi dengan konsep konsolidasi lahan milik warga yang sudah bersertifikat.

Guna memberikan contoh bagi khalayak, Pemerti Code bersama pihak swasta saat ini tengah merumuskan

konsep konsolidasi lahan di Kampung Jetisharjo pinggiran Kali Code. Terdapat delapan hingga sepuluh rumah yang siap dikonsolidasikan. "Nanti akan dibangun rumah vertikal dan bisa dimanfaatkan bersama-sama. Selain memberikan rasa aman dan nyaman dari bencana, juga bisa menjadi pemasukan tambahan dari sisi ekonomi bagi pemilik lahan," terangnya.

Totok kembali menegaskan, manajemen pengelolaan air hujan di kawasan perkotaan selama ini juga masih belum berubah. Yakni, air hujan selalu dialirkan untuk dibuang ke sungai. Hal ini pun berdampak pada beban sungai yang semakin berat dan ancaman bagi warga di bantaran.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005